

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Bologne, Jack. *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*. Boston: Butterworth-Heinemann, 1993.
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus A.T. Napitupulu. *Komentar atas Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hidayat, Taufik. *Hukum penyadapan dalam perspektif HAM dan konstitusi: kajian reformulasi kebijakan penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai HAM di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Iftitahsari. *Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.

- Manthovani, Reda. *Penyadapan Vs Privasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga: CV. Sketsa Media, 2022.
- Panjaitan, Trimedyta. *Parlemen dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016.
- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Ramadhan, Febriansyah. *Dimensi Keadilan Pluralitas*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Rizkia, N. D. dkk. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- SA, Romli. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Susiani, Dina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Sukoharjo: Tahta Media Grup, 2022.

Syauket, Amalia dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Cetakan IV, 2013.

JURNAL :

Argiansyah, Hikmal Yusuf, dan M. Rizki Yudha Prawira. “Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 64.

Armansyah. “Urgensi Supremasi Hukum sebagai Pilar Kestabilan Sosial.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 111.

Badjuri, Achmad. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 1 (2011): 87.

Bediona, Kornelis, dkk. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 14.

Burnama, Rizky, dan M. Nur Rasyid. “Penyadapan Informasi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Hak Privasi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 2 (2019): 279–289.

Christianto, Hwian. “Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Prioris* 5, no. 2 (2016): 51.

Eddyono, Supriyadi Widodo. “Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP.” *Teropong: Media Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2014): 48.

- Fachrunisa, Syifa. "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 46.
- Jawa, Dominikus, Malau Parningotan, dan Ciptono Ciptono. "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1013.
- Jusuf, Virginia Agnes Theresia. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) dalam Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 84.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 20.
- Laurencia, Tamara. "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 2 (2019): 126.
- Munandar, Agung, Syahrudin Nawi, dan Askari Razak. "Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8779.
- Murthada, Murthada, dan Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 121.
- Natamiharja, Rudi, dkk. "Balancing Two Conflicting Perspectives on Wiretapping Act: Rights to Privacy and Law Enforcement." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 1 (2022): 21.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 21.
- Pribadi, Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 119.

- Ramadhan, Tutik Nurul, dan Bambang Sugiri. "Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 553.
- Rohmana, Nanda Yoga. "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 118.
- Setiawan, Irfan, dkk. "Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): 5246.
- Soemanto, RB. "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi." *Yustisia* 3, no. 1 (2014): 81.
- Sofyan, Iwan. "Model Pengaturan Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi." *Philosophia Law Review* 4, no. 1 (2024): 67.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 526.
- Sulistiyono, Happy Try. "Prosedur Autentifikasi Alat Bukti Elektronik Pada Pemeriksaan Persidangan." *Varia Peradilan Edisi Digital*, no. 396 (2020): 5.
- Suntoro, Agus. "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 32.
- Sutrisno, Anom. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 24.
- Ulaen, Raldy J. "Makna Hukum Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Praktik Perkara Pidana." *Lex et Societatis* 6, no. 5 (2018): 137.
- Utami, Andari Dwi. "Peran Alat Bukti Penyadapan Dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi." *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 1 (2020): 134–135.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Putusan MK No. 006/PUU-I/2003

Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010

Universal Declaration of Human Rights 1948.

INTERNET :

- ANTARA, “Bamsuet Minta Aturan Penyadapan di KPK Perlu Lebih Jelas,” 20 November 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4481081/bamsuet-minta-aturan-penyadapan-di-kpk-perlu-lebih-jelas>, diakses 2 Januari 2026.
- Edith Koesoemawiria “Razia Mafia Terbesar Dalam Sejarah AS,” 20 Januari 2011, <https://www.dw.com/id/razia-mafia-terbesar-dalam-sejarah-as/a-14777329>, diakses 11 Februari 2026.
- Kompas, “KPK: Penyadapan Anggodo untuk Lacak Anggoro,” 4 November 2009, <https://biz.kompas.com/read/2009/11/04/15103949/kpk-penyadapan-anggodo-untuk-lacak-anggoro>, diakses 15 Februari 2026.
- Kompas, “PR Besar RUU Penyadapan,” 3 Desember 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pr-besar-ruu-penyadapan>, diakses 15 Februari 2026.
- Kompas, “RUU Penyadapan Harus Jaga Hak Privasi Warga dan Kepastian Hukum,” 30 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ruu-penyadapan-harus-lindungi-hak-privasi-warga-sekaligus-beri-kepastian-hukum-aph>, diakses 15 Februari 2026.
- Kumparan, “7 Bentuk-Bentuk Korupsi dan Contohnya,” 14 Oktober 2023, <https://kumparan.com/berita-update/7-bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-21NWvAB3x5m/4>, diakses 7 desember 2025.
- Liputan 6, “Aboe Bakar PKS: Saya Kerap Disadap KPK Soal Perempuan,” 27 Juni 2013, <https://www.liputan6.com/news/read/624281/aboe-bakar-pks-saya-kerap-disadap-kpk-soal-perempuan>, diakses 20 Januari 2026.
- Tempo, “MK: Penyadapan atas Setya pada Kasus Papa Minta Saham Ilegal,” 7 September 2016, <https://www.tempo.co/hukum/mk-penyadapan-atas-setya-pada-kasus-papa-minta-saham-ilegal-nbsp-1335812>, diakses 26 Oktober 2025.

- Tempo, “Politikus DPR Curhat Disadap KPK,” 27 Juni 2013, <https://www.tempo.co/politikus-dpr-curhat-disadap-kpk-1600671>, diakses 20 Januari 2026.
- Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, diakses 4 November 2025.
- Todung Mulya Lubis, “Langit Hitam Pemberantasan Korupsi,” 21 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/langit-hitam-pemberantasan-korupsi>, diakses 7 Desember 2025.
- Transparency International Indonesia Tahun 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2025> diakses 15 Februari 2026.
- Wicipto Setiadi, “Penyadapan dalam Negara Hukum: Perluasan KUHAP atau UU Khusus?,” 18 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyadapan-dalam-negara-hukum--perluasan-kuhap-atau-uu-khusus-lt68a28c15b95fb/>, diakses 19 Januari 2026.

KAMUS :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “privasi,” <https://kbbi.web.id/privasi>, diakses 26 Oktober 2025.